

SKRIPSI

**PENGARUH *MILITARY EXPENDITURE* TERHADAP KONSTALASI
KONFLIK ARMENIA - AZERBAIJAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Departemen Ilmu
Hubungan Internasional**

Oleh:

A.M. AGUNG ALFARIZI

E 061 171 319

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH *MILITARY EXPENDITURE* TERHADAP
KONSTALATASI KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN

N A M A : A.M. AGUNG ALFARIZI

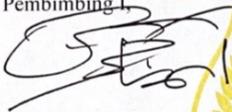
N I M : E061171319

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

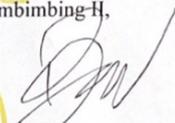
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 Agustus 2021

Pembimbing I,


Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,


Bama Andika Putra, S.IP, MIR
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,




H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH *MILITARY EXPENDITURE* TERHADAP
KONSTALATASI KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN

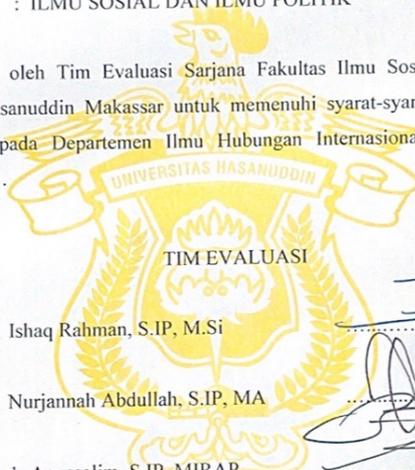
N A M A : A.M. AGUNG ALFARIZI

N I M : E061171319

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 6 Agustus 2021.



Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Burhanuddin, S.IP, M.Si

3. Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of the team members. Each signature is written over a horizontal dotted line. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, and the third for the member.

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.M. Agung Alfarizi

NIM : E061171319

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pengaruh *Military Expenditure* Terhadap Konstalasi

Konflik Armenia-Azerbaijan

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil-alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Agustus 2021



A.M. Agung Alfarizi

ABSTRAK

A.M. Agung Alfarizi, “Pengaruh *Military Expenditures* Terhadap Konstelasi Konflik Armenia – Azerbaijan” dibawah bimbingan **Agus Salim Burhanuddin** selaku pembimbing I dan **Bama Andika** selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Military Expenditure* Armenia dan Azerbaijan serta pengaruh *Military Expenditure* dalam konflik Armenia dan Azerbaijan. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode analitis dengan menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam menganalisis data tersebut, digunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *military expenditures* Armenia dan Azerbaijan terbagi menjadi tiga faktor utama: ekonomi, politik, geopolitik dan geostrategi. Pengaruh *military expenditures* terhadap konflik Armenia dan Azerbaijan pada perang enam pekan 2020 lalu adalah Azerbaijan memenangkan perang dan Armenia kehilangan kendali atas wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai sejak 1994, Armenia harus menarik pasukan dari wilayah-wilayah tersebut.

Kata kunci: *military expenditures, Nagorno-Karabakh, konflik perbatasan*

ABSTRACT

A.M. Agung Alfarizi, "The Influence of Military Expenditures on the Improvement of the Conflict Constellation of Armenia - Azerbaijan" under the guidance of **Agus Salim Burhanuddin** as supervisor I and **Bama Andika** as supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to identify and explain the factors that influence the Armenian and Azerbaijani Military Expenditure and the influence of Military Expenditure in the Armenian and Azerbaijani conflict. To achieve this goal, the research method used is analytical method using data obtained through literature study. In analyzing the data, qualitative analysis techniques were used.

The results of this study indicate that the factors that affect the military expenditures of Armenia and Azerbaijan are divided into three main factors: economic, political, geopolitical and geostrategic. The effect of military expenditures on the Armenian-Azerbaijani conflict in the six-week war of 2020 was that Azerbaijan won the war and Armenia lost control of the territories they had controlled since 1994, Armenia had to withdraw troops from these areas.

Keywords: military expenditures, Nagorno-Karabakh, border conflict

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Konflik Perbatasan.....	17
B. Konsep Security Dilemma.....	22
C. Military Industrial Complex.....	27
D. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM.....	31
A. Konflik Armenia-Azerbaijan.....	31
B. Military Expenditure Armenia-Azerbaijan.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Faktor Faktor yang Mempengaruhi <i>Military Expenditure</i> Armenia-Azerbaijan ..	53
B. Pengaruh <i>Military Expenditures</i> Dalam Konflik Armenia – Azerbaijan.....	69
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Definisi <i>Military Expenditures</i> Menurut SIPRI.....	43
Tabel 4.1. Perbandingan Ekonomi Armenia – Azerbaijan.....	57
Tabel 4.2. Daftar Faktor-faktor yang Menentukan <i>Military Expenditures</i> Suatu Negara.....	58
Tabel 4.3. Perbandingan <i>Military Expenditures</i> Armenia-Azerbaijan.....	62
Tabel 4.3. Rudal, Drones, dan Artileri Roket Armenia.....	75
Tabel 4.4. Rudal, Drones, dan Artileri Roket Azerbaijan.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Wilayah Nagorno-Karabakh.....	31
Gambar 3.2. Peta Armenia.....	32
Gambar 3.3. Peta Azerbaijan.....	33
Gambar 3.4. Konflik Armenia Azerbaijan Pada 2020.....	40
Gambar 4.1. Wilayah Nagorno-Karabakh Pasca Perang Enam Pekan 2020.....	74

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kerangka Konsep Penelitian.....	11
Bagan 4.1. MIC Armenia dan Azerbaijan.....	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan <i>Military Expenditures</i> Armenia – Azerbaijan.....	44
--	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi Hubungan Internasional dewasa ini telah diwarnai dengan berbagai studi terhadap fenomena internasional yang bersifat *low politics*, seperti isu lingkungan, gender, *human- trafficking*, dan lain sebagainya. Meski demikian, studi terhadap fenomena *high-politics* dalam Hubungan Internasional seperti konflik dan perdamaian masih menjadi suatu kajian yang menarik bagi akademisi Hubungan Internasional. Salah satu kajian *High Politics* yang hangat diperbincangkan saat ini adalah konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang kembali memanas beberapa waktu lalu.

Armenia dan Azerbaijan adalah negara yang terletak di Asia Barat dan merupakan bekas pecahan Uni Soviet. Konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh telah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu, saat seluruh Kawasan tersebut masih dibawah kuasa Bolshevik pada tahun 1920-an. Sewaktu masih dibawah kekuasaan kekaisaran Rusia (Uni Soviet), gesekan antara Kedua negara tersebut masih dapat dikendalikan. Namun ketika Uni Soviet telah runtuh, tidak ada kekuatan yang dapat menahan perang terbuka antara negara Armenia dan Azerbaijan. Sejarah panjang masih menjadi faktor pemicu kedua negara belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Sengketa wilayah Nagorno-Karabakh.

Nagorno-Karabakh merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kaukasus Selatan. Sebanyak 95% dari populasi Nagorno-Karabakh merupakan etnis

Armenia. Bagi Azerbaijan, Nagorno-Karabakh adalah bagian dari negara mereka yang diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan akan mempertahankannya sebagai status quo. Geopolitik menjadi faktor yang membuat posisi Nagorno-Karabakh menjadi begitu sangat penting bagi kedua negara. Sementara itu bagi Armenia, Nagorno-Karabakh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mereka, mengingat sebagian besar penduduk yang berada dan tinggal di daerah tersebut merupakan etnis Armenia. Walaupun konflik ini telah menimbulkan banyak kerugian bagi kedua negara, kedua negara sulit untuk menyepakati resolusi konflik untuk menciptakan perdamaian diantara keduanya. Terbukti dari kedua negara yang tetap bersiagaserta meningkatkan pertahanan militer mereka.

Pada tahun 1980-an hingga 1994, terjadi konflik bersenjata di daerah Nagorno-Karabakh antara etnis mayoritas Armenia oleh Republik Armenia dengan Republik Azerbaijan di daerah kantong. Bentrokan antar-etnis pecah tidak lama setelah parlemen NKAO (*Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast*) di Azerbaijan pada tanggal 20 Februari 1988 menyatukan wilayah tersebut dengan Armenia (Croissant, 1998). Pada akhir musim dingin di tahun 1992, pertempuran dengan skala besar meletus. OSCE (*Organization for Security and Co-operation in Europe*) beserta beberapa kelompok internasional lainnya melakukan mediasi dan gagal memberikan resolusi akhir untuk membuat kedua negara tersebut bekerjasama. Pasukan Armenia kemudian merebut sendiri daerah luar kantong pada musim semi tahun 1993. Pada tahun 1994, etnis Armenia berhasil sepenuhnya menguasai sebagian besar daerah Nagorno-Karabakh dan menahan pergerakan tentara Azerbaijan. Kemudian pada Mei tahun 1994, sebuah perjanjian gencatan senjata

yang dimediasi oleh Rusia ditandatangani. Sejak itu, pembicaraan damai yang dimediasi oleh kelompok OSCE telah dilakukan.

Pada 2008, terjadi pertempuran kecil di Mardakert yang tepatnya terjadi pada tanggal 4 Maret. Pertempuran ini dimulai setelah protes pemilihan umum dilaksanakan di Armenia dan termasuk juga pertempuran sengit antara etnis Armenia dengan pasukan Azerbaijan terkait sengketa wilayah Nagorno-Karabakh sejak genjatan senjata yang dilakukan pada tahun 1994 (BBC News, 2008). Sumber dari Armenia menuduh pihak Azerbaijan mengambil keuntungan dari peristiwa kerusuhan tersebut. Sedangkan Sumber dari Azerbaijan menyalahkan Armenia bahwa pemerintah Armenia berusaha mengalihkan isu dari ketegangan internal yang terjadi di Armenia. Pada 14 Maret 2008, Majelis Umum PBB memberlakukan Resolusi 62/243 yang menuntut agar pasukan Armenia menarik semua tentaranya dari wilayah milik Azerbaijan yang telah mereka duduki sejak 1994.

Pada 18 Februari 2010, terjadi saling tembak antara Angkatan Bersenjata Azerbaijan dengan pasukan militer Armenia Karabakh. Azerbaijan menuduh pasukan dari pihak Armenia menembaki pos-pos milik Azerbaijan dekat Desa Tekan Garagoyunlu, Qiziloba, Yusifcanli, Cavahirli, dan Qapanli, serta di dataran tinggi Agdam Rayon dengan senapan kecil (penembak jitu) sehingga mengakibatkan 3 tentara Azerbaijan tewas dan satu terluka (rferl, 2012). Pertempuran Lanjutan kemudian terjadi pada tahun 2011-2013. Diawali dengan seorang anak laki-laki Azerbaijan yang tewas oleh penembak jitu Armenia, disusul dengan bentrokan di perbatasan yang menyebabkan korban sepanjang tahun 2011, 10 tentara Armenia tewas (rferl, 2012). Tahun 2012 juga terjadi bentrokan perbatasan yang menyebabkan keseluruhan 19 tentara Azeri dan 14 tentara Armenia

tewas. Selanjutnya sepanjang tahun 2013 pada saat konflik diperbatasan, 12 tentara Azeri dan 7 tentara Armenia tewas (Guardian, 2014)

Pada tahun 2014, terjadi bentrokan dan penembakan helikopter. Awal dari bentrokan yang terjadi dikarenakan bentrokan perbatasan yang Meletus dan mengakibatkan 16 korban jiwa di kedua belah pihak (referl, 2014). Selanjutnya, Angkatan bersenjata Azerbaijan menembak jatuh sebuah helikopter Mil Mi-24 Tentara Pertahanan Nagorno-Karabakh pada tanggal 12 November 2014 di atas Distrik Agdam, Karabakh dan menyebabkan tiga prajurit tewas saat kejadian itu. Kementerian Pertahanan Armenia menyebutkan bahwa helikopter tersebut tidak bersenjata dan menganggap bahwa kejadian itu merupakan sebuah provokasi. Pemerintah Azeri kemudian mengklaim bahwa helikopter itu mencoba menyerang posisi tentara Azeri (Agayev & Khojayan, 2014). Pada tahun 2015, terjadi perlawanan sporadis yang berlangsung sepanjang tahun dari Januari hingga Desember.

Pada tahun 2016, bentrokan Kembali terjadi di wilayah sengketa antara *Republic de facto* Artsakh dan Azerbaijan. Konflik ini biasa juga disebut sebagai Perang Empat Hari atau bentrokan April dan dimulai sejak 1 April – 5 April 2016. Wilayah ini mencakup bekas Oblast Otonomi Nagorno-Karabakh Soviet dan sekitarnya, yang merupakan bagian integral dari Republik Artsakh menurut dan secara konstitusi yang ada (Ministry of Foreign Affairs Republic of Artsakh, 2019). Skala aksi militer, jumlah pasukan dan peralatan tempur yang digunakan, seperti tank, Artileri berat, Angkatan udara, drone bunuh diri, serta pernyataan pejabat Azerbaijan menunjukkan bahwa peristiwa 2-5 April ini bukanlah eskalasi spontan. Melihat operasi militer yang direncanakan dengan hati hati, yang bertujuan untuk

menyelesaikan konflik Karabakh dengan menggunakan kekuatan, bukan secara damai. (Mayilian, 2019). Gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan kemudian baru tercapai pada 5 April di Moskow. Otoritas Nagorno-Karabakh menyambut baik perjanjian lisan tersebut. Departemen Luar Negeri AS memperkirakan bahwa ada 350 korban jiwa, baik dari militer maupun warga sipil pada peristiwa ini (U.S. Department of State, 2016).

Konflik Nagorno-Karabakh kemudian terjadi lagi pada tahun 2020. Konflik ini merupakan konflik bersenjata antara Azerbaijan yang didukung oleh Turki, dan Armenia memproklamkan diri Bersama Republik Artsakh. Bentrokan dimulai pada tanggal 27 September 2020 di sepanjang Garis Kontak Nagorno-Karabakh, yang didirikan setelah perang pertama tahun 1988-1994. Menanggapi hal tersebut, Armenia dan Artsakh memberlakukan darurat militer dan mobilisasi total, sementara Azerbaijan memberlakukan darurat militer, jam malam, dan mobilisasi parsial. Banyak negara dari perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras pertempuran itu dan meminta kedua belah pihak untuk mengurangi ketegangan dan melanjutkan negosiasi (france24, 2020). Setelah penangkapan Shusha, pemukiman terbesar kedua di Nagorno-Karabakh, perjanjian gencatan senjata ditandatangani antara Presiden Azerbaijan, (Ilham Aliyev), Perdana Menteri Armenia (Nikol Pashinyan), dan Presiden Rusia (Vladimir Putin) yang mengakhiri perang ini. Presiden Artsakh, Arayik Harutunyan, juga setuju untuk mengakhiri permusuhan. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang bertikai akan tetap mengontrol wilayah yang mereka kuasai saat ini di Nagorno-Karabakh, sementara Armenia mengembalikan wilayah sekitarnya yang diduduki pada tahun 1994 ke Azerbaijan. Sekitar 2.000 tentara Rusia dikerahkan untuk menjaga perdamaian di sepanjang

koridor Lachin antara Armenia dan Nagorno-Karabakh untuk mandat setidaknya lima tahun (The Moscow Times, 2020).

Kemampuan pertahanan sebuah negara sama-sama diuji dalam setiap konflik. *Military Expenditure* (ME) atau Pembiayaan Militer menjadi salah satu faktor jalannya konflik. Pembiayaan Militer sering kali mencerminkan kekuatan pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak dan Negara lain, pertumbuhan ekonomi, militer, serta sebagaimana kemampuan suatu negara untuk membiayai kegiatan militernya. Dampak *Military Expenditure* terhadap pertumbuhan merupakan fungsi non-linier tentang keefektivitasan militer yang ditimbulkan oleh negara-negara asing dan kekuatan eksternal lainnya. Pembiayaan militer tanpa ancaman akan mengurangi pertumbuhan anggaran militer, sedangkan pembiayaan militer dengan adanya ancaman yang cukup besar akan meningkatkan pertumbuhan/penambahan anggaran militer. (Joshuan Aizenman, 2016).

Dalam kasus Armenia dan Azerbaijan terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam Pembiayaan Militer masing-masing negara. Pengeluaran Kementerian Pertahanan Azerbaijan mencapai US \$ 2 miliar, sedangkan Armenia mengeluarkan biaya sebesar US \$ 640 juta (Sarukhanyan, 2020). Namun diluar dari perbandingan dari pembiayaan Militer kedua negara itu, Armenia masih dapat menandingi Azerbaijan dalam perebutan wilayah yang berlangsung selama hampir 3 dekade ini.

Berdasarkan laporan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dalam 10 tahun terakhir *Military Expenditure* antara Armenia dengan Azerbaijan terpaut 2-3x lipat satu sama lain, dimana Azerbaijan menjadi negara

yang lebih banyak mengeluarkan belanja militer. Hal ini dapat dilihat dimana *Military Expenditure* Armenia dari tahun 2010-2020 adalah US\$ 397 juta, US\$ 364 juta, US\$ 372 juta, US\$ 419 juta, US\$ 426 juta, US\$ 461 juta, US\$ 453 juta, US\$ 464 juta, US\$ 523 juta, US\$ 652 juta, dan US\$ 635 juta. Sementara Azerbaijan adalah US\$ 1094 juta, US\$ 2081 juta, US\$ 2159 juta, US\$ 2184 juta, US\$ 2192 juta, US\$ 2330 juta, US\$ 1554 juta, US\$ 1631 juta, US\$ 1716 juta, US\$ 1854 juta, dan US\$ 2173 juta. (SIPRI, 2021).

Pengeluaran terhadap militer yang relatif besar oleh Azerbaijan didukung oleh kekuatan ekonominya yang kuat selama periode “*oil boom*” yaitu ketika Azerbaijan menemukan ladang minyak dan gas besar di Laut Kaspia. Antara tahun 2000 dan 2010, ekonomi tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Menurut sebuah studi oleh Transparency International, persentase orang miskin dalam populasi turun dari hanya di bawah 50 persen pada tahun 2001 menjadi kurang dari 16 persen pada tahun 2008 (DW, 2018). Hal ini tentu mendorong belanja militer Azerbaijan menjadi lebih besar, karena disokong oleh kemampuan ekonomi mereka.

Ekonomi Armenia bergantung pada sektor manufaktur, jasa, pengiriman uang, dan pertanian. Rusia adalah pasar ekspor utama Armenia, dan Armenia bergabung dengan Uni Ekonomi Eurasia Rusia pada 2015. Rusia juga menandatangani Perjanjian Kemitraan Komprehensif dan Ditingkatkan dengan Uni Eropa pada 2017. Pemerintah sangat bergantung pada pinjaman dari Rusia dan lembaga keuangan internasional. Sehingga kesehatan ekonomi fiskal dari Armenia jauh di bawah Azerbaijan dimana Armenia pada 2020 kesehatan fiskalnya hanya sebesar 84,3%, sementara Azerbaijan berada di angka 99,4% (heritage.org, 2021).

Dari kondisi ekonomi tersebut Armenia tidak dapat mengeluarkan pembiayaan militer sebesar Azerbaijan, karena tidak disokong oleh kemampuan ekonomi yang setara.

Selain dari peran ekonomi kedua negara terhadap *Military Expenditure* mereka, faktor lain yang juga berperan dalam jalannya konflik Armenia-Azerbaijan adalah aktor kawasan seperti Rusia dan Turki. Seperti diketahui bahwa baik Armenia dan Azerbaijan adalah negara eks-Soviet, sehingga keduanya memiliki hubungan yang relatif baik dengan Rusia. Dari sisi Azerbaijan, Turki merupakan negara yang paling bersahabat dengan mereka. Dimana mayoritas etnis yang mendiami Azerbaijan adalah mereka yang keturunan Turki. Selain itu, Turki juga memberikan bantuan langsung dalam konflik Nagorno-Karabakh pada 2020 lalu, dimana Turki menyediakan alutsista-alutsista strategis seperti Pesawat Tanpa Awak / UAV kepada pihak Azerbaijan yang kemudian membawa dampak yang sangat signifikan terhadap hasil jalannya konflik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Military Expenditure* antara Armenia dan Azerbaijan dalam tiap konfliknya dalam bentuk skripsi berjudul **“Pengaruh *Military Expenditure* Terhadap Konstelasi Konflik Armenia-Azerbaijan”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang telah diuraikan, untuk memudahkan penelitian ini, penulis akan membatasi penelitian dan berfokus pada periode waktu konflik tahun 2020 dan pengaruh *Military Expenditure* terhadap kedua negara, yakni Armenia dan Azerbaijan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi *Military Expenditure* Armenia dan Azerbaijan?
- b. Bagaimana pengaruh *Military Expenditure* dalam Konflik Armenia-Azerbaijan 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Military Expenditure* Armenia dan Azerbaijan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaruh *Military Expenditure* dalam konflik Armenia dan Azerbaijan

b. Kegunaan Penelitian

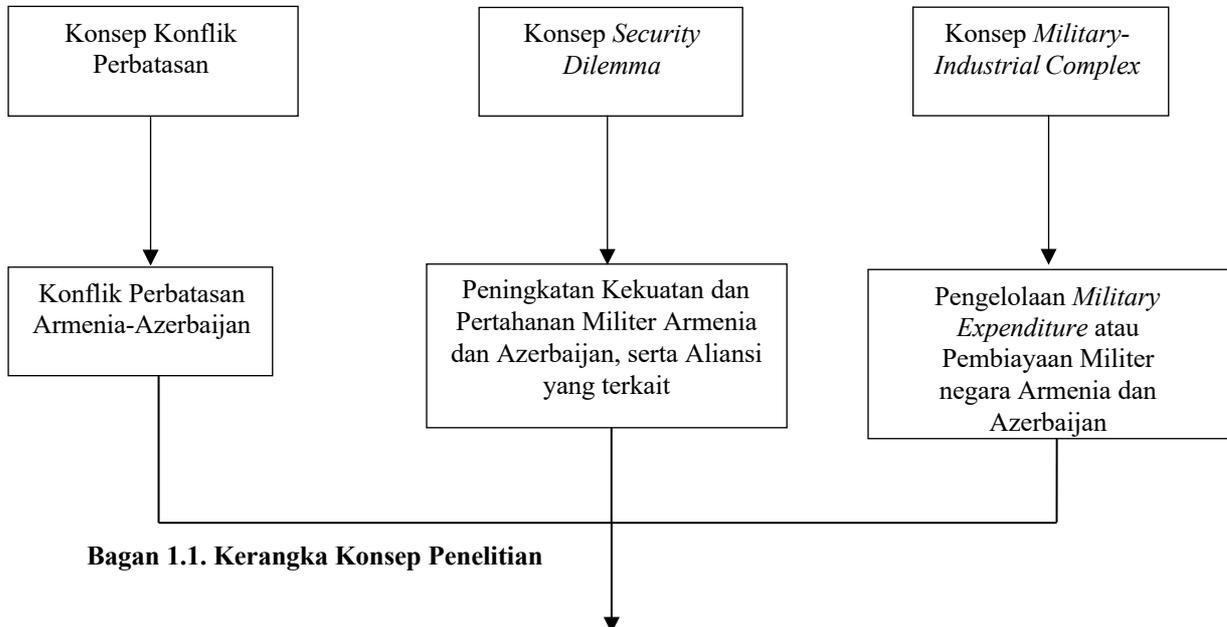
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, dapat dijadikan penelitian, dan dijadikan bahan perbandingan studi terkait bagi pengembangan studi Hubungan Internasional kedepannya
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi lebih kepada mahasiswa atau akademisi terkait konflik Armenia-Azerbaijan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga konsep yaitu konsep konflik perbatasan, *security dilemma*, dan *Military Industrial Complex*. Konsep konflik perbatasan menjadi dasar dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh Armenia- Azerbaijan dimana, konsep ini menjelaskan bahwa perbatasan merupakan wilayah kedaulatan dan menjadi hal krusial yang patut untuk diperjuangkan oleh kedua negara. Konsep *security dilemma* menjadi landasan dalam

menjelaskan bagaimana negara Armenia dan Azerbaijan beserta negara aliansi keduanya merespon Tindakan defensive atau melihat bagaimana kedua negara saling meningkatkan pertahanan dan kekuatan militernya. Konsep *military industrial complex* dan menjadi konsep terakhir yang akan digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan tentang bagaimana *Military Expenditure* atau pembiayaan militer antara negara Armenia dan Azerbaijan.

Kerangka Konseptual Penelitian



Bagan 1.1. Kerangka Konsep Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Military Expenditure* Armenia dan Azerbaijan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaruh *Military Expenditure* dalam konflik Armenia dan Azerbaijan

a. Konflik Perbatasan

Konsep pertama yang digunakan oleh penulis yaitu konsep perbatasan. Fenomena kekerasan dan konflikual yang bersifat structural, historis, dan etimologis memiliki hubungan yang dalam dengan perbatasan. Secara historis, perbatasan dapat dianggap sebagai alat untuk mendirikan kekerasan untuk menegaskan, mempertahankan, dan menyebarkan kekuasaan politik. Periode modern menyaksikan persimpangan perbatasan dengan kekerasan dan konflik melalui esensialisasi perbatasan, yang dikurangi-dihilangkan kompleksitas manusiawi mereka untuk memecah belah garis statis pada peta modern yang berfungsi sebagai alat paling ampuh untuk melaksanakan otoritas eksklusif

kedaulatan negara-bangsa Barat modern menyebar ke seluruh dunia melalui penjajahan (Jones, 2019).

Menurut Belcher, konflik perbatasan adalah:

[b]orders do more than simply mark territorial margins [...] borders are epistemological and material sites with the power to shape subjectivities, differentiate and produce categories of 'citizen' and 'migrant', and trace inclusive and exclusive fields of possibilities, as well as limits.(Belcher et al. dalam Jones, 2019).

Dalam pernyataan diatas, Belcher menjelaskan bahwa perbatasan tidak hanya sekedar penanda dari suatu teritori wilayah melainkan hal tersebut meliputi kontrol atas suatu negara, kekuatan, dan kedaulatan. Atas dasar itulah negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya dalam menjaga kedaulatan dan keamanannya. Perbatasan yang menjadi hal krusial inilah yang seringkali menimbulkan benih konflik antar negara, dikarenakan pemenuhan masing-masing kepentingan nasional yang dikejar dalam hal menjaga kedaulatan.

Wilayah dari suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya. Batas wilayah tersebut berfungsi sebagai pembatas atau penanda daerah kedaulatan suatu negara. Pemahaman dan pengenalan batas wilayah memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan, dan pertahanan keamanan suatu negara. Perbatasan negara juga merupakan sebuah ruang geografis yang awalnya merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, terutama ditandai oleh adanya pertarungan dan perebutan wilayah untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari eksistensi dan sejarah negara, riwayat daerah perbatasan tidak lepas dari sejarah kelahiran atau/bahkan berakhirnya berbagai negara (Bangun, 2017).

b. Security Dilemma

Konsep kedua yang digunakan oleh penulis adalah konsep *security dilemma*. *Security dilemma* atau dilema keamanan dalam Hubungan Internasional kerap digambarkan sebagai situasi atau keadaan yang dimana sebuah negara mengambil tindakan untuk memperkuat sistem keamanan dan pertahanannya, seperti membentuk sebuah aliansi dengan negara lain atau meningkatkan kekuatan militer. Hal tersebut dapat membuat negara lain yang terutama negara tetangga sekitar, merespon tindakan tersebut dengan cara serupa. Hal tersebut dapat menciptakan bahkan meningkatkan ketegangan hingga terciptanya konflik (Jervis, 1978).

Menurut John H. Herz, *security dilemma* dalam Hubungan Internasional merupakan gagasan struktural yang dimana upaya-upaya yang diambil oleh suatu negara untuk menjaga keamanannya sendiri, terlepas dari apapun niatnya, cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara-negara lainnya, terutama negara yang berada di sekitarnya, karena masing-masing negara yang melakukan tindakan tersebut menganggap bahwa tindakan yang diambil hanyalah bersifat defensif dan tindakan yang diambil oleh negara lain bersifat mengancam (Herz, 1950).

Kepekaan *security dilemma* adalah niat dan kapasitas aktor untuk memahami motif di balik suatu masalah atau hal, dan untuk menunjukkan daya tanggap terhadap potensi kompleksitas niat militer orang/pihak lain. Secara khusus, ini mengacu pada kemampuan untuk memahami peran yang mungkin dimainkan oleh rasa takut dalam sikap dan perilaku mereka, termasuk peran yang mungkin dimainkan oleh tindakan seseorang dalam memprovokasi rasa takut itu. (Nicholas Wheeler & Booth, K., 2008)

Melihat sejarah Panjang yang terjadi di kedua perbatasan negara atau wilayah sengketa tersebut yakni Nagorno-Karabakh, sering terjadi percikan yang mengakibatkan negara Armenia dan Azerbaijan mengambil langkah agar meningkatkan pertahanannya. Dalam konflik antara Armenia dan Azerbaijan, masing-masing kedua negara itu meningkatkan pertahanan dan pembiayaan militer mereka, serta melakukan aliansi atau Kerjasama dengan pihak lain karena sama-sama merasa terancam dengan peningkatan kekuatan negara bertetangga tersebut.

c. Military Industrial Complex

Konsep ketiga yang digunakan adalah konsep *Military Industrial Complex*. *Military Industrial Complex* merupakan sebuah konsep yang menjelaskan tentang relasi antara *stakeholder* yang terlibat dalam proses belanja persenjataan militer oleh suatu negara. Konsep ini dipopulerkan oleh mantan presiden Amerika Serikat yaitu Dwight D. Eisenhower.

Terminologi *military-industrial complex* menurut Alex Mintz masih ambigu dan kontroversial. Kaum radikal menganggap ekonomi industri pertahanan sebagai mesin yang meningkatkan perlombaan senjata dan melanggengkan perang dingin, serta memandang para elit pemerintah AS sebagai konspirator yang mengejar kepentingan dan tujuan pribadi. Kaum yang lebih moderat memandang terminologi ini hanya sebagai salah satu dari beberapa kelompok kepentingan yang kuat dalam masyarakat AS. Slater dan Nardin kemudian menyatakan bahwa *military-industrial complex* terdiri dari dua bagian: internal (inti) serta badan tambahan. Dalam konteks AS, komponen internal adalah perwira militer senior (pihak militer), pemilik industri pertahanan (swasta), politisi yang karir dan

kepentingan politiknya terkait dengan bidang pertahanan dan anggota Kongres (leglatif) yang konstituennya mendapat manfaat dari alokasi dana federal ke sektor pertahanan. (Mintz, 1985).

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yakni, *Military-Industrial Complex* merupakan hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengadaan senjata pertahanan negara. Umumnya aktor yang terlibat tersebut ada tiga: pemerintah/eksekutif, legislatif, dan perusahaan industri pertahanan. Ketiga aktor ini dikenal sebagai *defense iron triangle* (DIT) atau segitiga besi pertahanan, dimana industri, pemerintah, dan legislatif memainkan peranan penting dalam setiap pengadaan persenjataan guna menunjang pengembangan industri pertahanan. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan proses pengolaan *Military Expenditure* atau pembelanjaan militer negara Armenia dan Azerbaijan.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, serta menginterpretasikan suatu fakta- fakta terkait sebuah fenomena tentang pengaruh *Millitary Expenditure* dalam konflik Armenia dan Azerbaijan.

b. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur dan bahan bacaan, sertaolahan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, catatan-catatan, dan laporan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teknik *library research*. *Library research* atau telaah Pustaka merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta meninjau literatur-literatur sumber baik data yang diperoleh secara *online* maupun *offline* terkait masalah yang akan diteliti.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif. Teknik ini menekankan berdasarkan pada fakta yang ada, kemudian dihubungkan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan analisis yang akurat.

e. Metode Penulisan

Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif menggambarkan dan menjelaskan permasalahan penelitian secara umum, yaitu konflik perbatasan antara Azerbaijan dan Armenia kemudian menarik kesimpulan secara khusus tentang pengaruh *Military Expenditure* terhadap jalannya konflik kedua negara di Nagorno-Karabakh pada 2020 lalu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Konflik Perbatasan

Sejarah umat manusia mencatat bahwa suatu kejadian besar terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu, dimana manusia yang sebelumnya berburu dan mengumpulkan makanan untuk hidup beralih dengan menetap di suatu wilayah dan melakukan domestifikasi terhadap segelintir tumbuhan dan hewan (Harari, 2017). Peristiwa tersebut dinamakan sebagai Revolusi Pertanian oleh Harari, yaitu suatu revolusi terhadap cara hidup umat manusia. Berkat revolusi tersebut, manusia yang awalnya hidup secara nomaden, mulai menetap pada suatu wilayah dan melakukan cocok tanam untuk bertahan hidup.

Kehidupan manusia yang semakin progresif pasca revolusi pertanian, manusia lalu membangun batas-batas atau menandai wilayah yang menjadi teritori mereka, kemudian membangun tembok-tembok sebagai upaya perlindungan dari pihak luar. Dengan kata lain, manusia telah menandai wilayah selama ribuan tahun, tindakan menciptakan perbatasan sama tuanya dengan pemukiman manusia.

Tonggak bersejarah terhadap upaya untuk memberi tanda terhadap batas-batas wilayah terjadi ketika era kekaisaran Romawi yang membangun tembok Hadrian di Inggris Utara pada 122 SM guna menghalau apa yang disebut sebagai Kaisar Hadrian sebagai orang bar-bar dari utara. Sejarah Kekaisaran Romawi adalah bukti bahwa menandai wilayah adalah tindakan politik dan merupakan pusat perbedaan antara barbarisme dan peradaban.

Perbatasan modern seperti yang sekarang kita kenal muncul ketika perjanjian Westphalia disepakati oleh Spanyol dan Belanda pada 1648. Westphalia, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia barat, menetapkan perbatasan untuk kepemilikan teritorial Inggris, Prancis, tanah Belanda, kerajaan Jerman, Muscovy, Polandia, Turki, Spanyol, dan Swedia. Westphalia menandai dimulainya era negara bangsa dan nasionalisme, dan lahirnya hubungan internasional di mana perbatasan menjadi perbatasan dan perbatasan, dan menandai domain kedaulatan suatu otoritas (Brunet-Jailly, 2015).

Perbatasan negara-negara modern merupakan suatu hal yang kompleks. Perbatasan menandai batas wilayah kedaulatan suatu negara yang dimana didalam teritori tersebut negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengelolanya untuk kepentingan rakyatnya. Sehingga perbatasan rentan terhadap suatu konflik yang melibatkan dua atau lebih negara yang saling berbatasan. Konflik yang terjadi akibat dari masalah perbatasan disebut dengan Konflik Perbatasan dalam hubungan internasional.

Perbatasan memiliki kaitan yang erat dengan fenomena kekerasan dan konflik yang bersifat historis, struktural, dan etimologis. Secara historis, perbatasan dapat dianggap sebagai alat pendiri kekerasan untuk menegaskan, mempertahankan, dan menyebarkan kekuatan politik (Brambilla & Jones, 2019). Dari kebangkitan ekspansi kekaisaran Romawi hingga kedaulatan negara-bangsa kontemporer, hubungan tak terpisahkan antara penelusuran perbatasan dan fondasi tatanan politik masyarakat Barat modern telah ditanamkan. Brambilla dan Jones menyatakan bahwa:

“The modern period witnessed an ‘exasperation’ of the intersections of borders with violence and conflict through the essentialisation of borders, which are reduced – deprived of their human complexity – to divisive static lines on modern maps serving as the most powerful tool to exercise the exclusive authority of the modern Western nationstate sovereignty spread through the world via colonisation” (Brambilla & Jones, 2019)

Dalam artian bahwa masyarakat modern pasca Whestphalia telah menyaksikan banyak konflik dan kekerasan yang terjadi akibat dari masalah perbatasan yang melegitimasi suatu otoritas yang disebut sebagai negara dan telah menjadi alat yang paling kuat dalam mengontrol suatu wilayah beserta isinya. Berkat kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat, konsep perbatasan geografis ini menyebar ke seluruh dunia.

Evolusi etimologis dan historis dari gagasan wilayah (*territory*) membuktikan sumber inspirasi yang baik yang menunjukkan bahwa hubungan antara "teror" dan "wilayah" (*territory*) lebih dari sekadar kebetulan. Wilayah dan teror memang memiliki etimologi yang terkait. Gagasan barat modern tentang wilayah negara-bangsa tidak hanya muncul dari bahasa Latin “*terra*” – “tanah” atau “medan”; tetapi juga dari “*territorium*”, yang mendapatkan arti dari dua kata Latin: “*territor*”, yang berarti “pemilik tanah”, tetapi juga “*terrere*” – “untuk menakut-nakuti” – dan dengan demikian argumen ini “wilayah” dan “teror”, berbagi akar yang sama. Menurut derivasi etimologis ini, menciptakan wilayah, yaitu ruang terbatas yang ditentukan oleh batas-batas pemisah linier, dengan sendirinya merupakan “tindakan pengucilan yang kejam; mempertahankannya membutuhkan kewaspadaan yang konstan dan mobilisasi ancaman; dan menantanginya selalu berarti pelanggaran” (Brambilla & Jones, 2019). Oleh karena itu, proses perbatasan mengungkapkan interaksi yang kompleks antara

inklusi dan eksklusif, dengan memungkinkan kita untuk memahami hubungan erat yang dimiliki dinamika inklusi/eksklusif dengan berbagai praktik penataan realitas.

Mempertahankan suatu perbatasan memerlukan kewaspadaan yang konstan dan melanggar atau menentang perbatasan tersebut berarti suatu pelanggaran adalah inti dari konflik perbatasan menurut Brambilla & Jones. Hal tersebut yang lumrah terjadi pada berbagai konflik perbatasan di seluruh dunia, dimana suatu negara tidak menerima atau dalam hal ini menentang perbatasan yang ada sebagai *status quo* dan negara lainnya akan meresponnya dengan mewaspadaikan upaya-upaya negara yang bersengketa dengannya dengan membangun kekuatan-kekuatan militer guna mempertahankan *status quo* tersebut.

Tahapan dalam suatu konflik menurut Brookins (Sabriana, 2021) terdiri dari *latent, emergence, escalation, stalemate, de-escalation, dispute settlement, dan peace building and reconciliation*. Tahapan ini lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. *Latent*. Merupakan tahap paling awal dimana dalam tahap ini, gesekan perselisihan antara pihak terkait belum terjadi.
2. *Emergence*. Pada tahap ini, konflik mulai muncul ketika aktor-aktor negara yang terlibat menyadari bahwa mereka memiliki ide dan pendapat yang berbeda tentang topik tertentu.
3. *Escalation*. Tahap ini masuk ketika aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tidak dapat mencapai resolusi, sehingga konflik meningkat dari sebelumnya.
4. *Stalemate*. Selama tahap ini, konflik telah berputar diluar kendali ke titik dimana tidak ada pihak yang berada dalam posisi untuk menang.

5. *De-escalation*. Pada tahap ini konflik mereda, karena ada pihak yang terlibat dalam konflik menyadari bahwa mereka tidak mungkin mencapai kesimpulan jika mereka melanjutkan keengganan mereka untuk melihat konflik dari semua sisi
6. *Dispute settlement*. Pada tahap ini, aktor-aktor saling mendengarkan keinginan masing-masing dan mulai menemukan solusi untuk masalah yang mereka hadapi.
7. *Peace building and reconciliation*. Ketika pihak yang terlibat telah mendapatkan titik kesepakatan maka tahap ini dimulai, yaitu pihak yang terlibat akhirnya kembali memperbaiki hubungan bahkan dapat bersepakat untuk menjalin kembali kerjasama. (Brookins 2017 dalam Isa Sabriana 2021 hal. 16-18).

Menurut Belcher, konflik perbatasan adalah:

[b]orders do more than simply mark territorial margins [...] borders are epistemological and material sites with the power to shape subjectivities, differentiate and produce categories of 'citizen' and 'migrant', and trace inclusive and exclusive fields of possibilities, as well as limits." (Belcher et al. dalam Jones, 2019).

Dalam pernyataan diatas, Belcher menjelaskan bahwa perbatasan tidak hanya sekedar penanda dari suatu teritori wilayah melainkan hal tersebut meliputi kontrol atas suatu negara, kekuatan, dan kedaulatan. Atas dasar itulah negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya dalam menjaga kedaulatan dan keamanannya. Perbatasan yang menjadi hal krusial inilah yang seringkali menimbulkan benih konflik

antar negara, dikarenakan pemenuhan masing-masing kepentingan nasional yang dikejar dalam hal menjaga kedaulatan.

Wilayah dari suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya. Batas wilayah tersebut berfungsi sebagai pembatas atau penanda daerah kedaulatan suatu negara. Pemahaman dan pengenalan batas wilayah memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan, dan pertahanan keamanan suatu negara. Perbatasan negara juga merupakan sebuah ruang geografis yang awalnya merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, terutama ditandai oleh adanya pertarungan dan perebutan wilayah untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari eksistensi dan sejarah negara, riwayat daerah perbatasan tidak lepas dari sejarah kelahiran atau/bahkan berakhirnya berbagai negara (Bangun, 2017).

Konflik perbatasan merupakan sebuah fenomena umum dalam hubungan internasional yang terjadi karena tidak tercapainya suatu kesepakatan diantara negara-negara terkait tentang perbatasan ataupun wilayah kekuasaan masing-masing. Hal yang terjadi pada kasus Nagorno-Karabakh dimana wilayah ini telah diperebutkan oleh Armenia dan Azerbaijan sejak keduanya merdeka dari Uni Soviet. Secara *de facto* wilayah sengketa Nagorno-Karabakh adalah milik Azerbaijan, namun secara *de jure* dikontrol dan dikuasai oleh etnis dan tentara Armenia.

B. Konsep Security Dilemma

Ciri utama negara modern meliputi memiliki wilayah yang jelas, sebuah pemerintahan yang diberi otoritas kedaulatan, serta pelaksanaan kekuasaan terhadap rakyat, dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain (Steans & Pettiford, 2009). Untuk mempertahankan kedaulatan tersebut, negara membangun pertahanan negara melalui upaya-upaya militer. Pandangan bahwa dalam dunia internasional, tidak ada

otoritas yang lebih tinggi dari negara atau ketiadaan otoritas global membuat negara harus membangun sendiri kapasitas pertahanannya agar bisa terhindar dari serangan atau ancaman negara lain.

Morgenthau dalam karyanya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* mengemukakan bahwa politik internasional penuh dengan prasangka: politik internasional sebagaimana halnya politik pada umumnya dituntun oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia yang penuh prasangka / *prejudice* sehingga melahirkan perilaku yang egoistis dan agresif. Dalam situasi anarkis, manusia berkecenderungan untuk berperilaku egoistis dan agresif demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam politik internasional, perilaku negara merefleksikan perilaku manusia di mana para pemimpin negara dalam melaksanakan politik luar negeri masing-masing memiliki pilihan terbatas, yakni bertindak egoistis dan agresif demi mempertahankan kelangsungan hidup negaranya dalam dunia internasional (Hadiwinata, 2017).

Kondisi anarkis global ini menurut Thomas Hobbes adalah “keadaan alami”: merupakan lingkungan manusia yang sangat tidak bersahabat di mana terdapat “keadaan perang”, “setiap manusia melawan manusia lainnya”; setiap manusia berbahaya bagi manusia lainnya dan tidak seorangpun yakin tentang keamanan dan kelangsungan hidupnya (Jackson & Sorensen, 2013). Sehingga untuk keluar dari “keadaan alami” tersebut, manusia membentuk suatu pelarian yang disebut sebagai negara yang berdaulat.

Alat pelarian tersebut (negara) digunakan untuk memutarbalikkan ketakutan manusia ke dalam kolaborasi bersama untuk membentuk perjanjian keamanan yang dapat menjamin keselamatan bersama. Dengan nilai dan ketertiban yang tetanam kuat, mereka akan berkolaborasi bersama menciptakan suatu negara dengan pemerintahan yang berdaulat yang memiliki kekuasaan absolut dan kekuatan yang dapat melindungi mereka baik dari kekacauan domestik maupun ancaman-ancaman yang berasal dari pihak asing (Jackson & Sorensen, 2013).

Solusi atas “keadaan alami” manusia dengan membentuk negara, otomatis melahirkan masalah politik yang serius. Dimana tindakan membentuk negara berdaulat dalam upaya terlepas dari “keadaan alami” yang menakutkan justru menciptakan “keadaan alami” yang lain oleh mereka yang di luar negara tersebut. Kondisi ini yang disebut sebagai suatu “dilema keamanan” atau *security dilemma* dalam dunia internasional. Jackson & Sorensen mendefinisikan dilema keamanan sebagai berikut:

dilema keamanan dalam politik dunia merupakan pencapaian keamanan personal dan keamanan domestik melalui penciptaan negara selalu disertai oleh kondisi ketidakamanan nasional dan internasional yang berakar dalam anarki sistem negara (Jackson & Sorensen, 2013).

Negara diatur dan dipersenjatai untuk berperang agar dapat memberikan perdamaian domestik bagi subjek atau warga negaranya. Tetapi di sisi lain, negara lain akan menganggap persenjataan diri suatu negara sebagai ancaman bagi negaranya sehingga mereka juga mempersenjatai diri mereka untuk melindungi diri. Hal ini terus berputar dibawah situasi anarki global.

Security Dilemma atau lazim dikenal sebagai *spiral model* adalah istilah yang diperkenalkan oleh pakar keamanan John H. Herz dalam bukunya berjudul *Political Realism and Political Idealism* (1951), mengacu pada situasi dilematis yang dihadapi

suatu negara di mana penambahan kekuatan militer untuk meningkatkan postur pertahanannya mendorong negara lain yang merasa terancam untuk ikut meningkatkan kekuatan militernya dan dapat bermuara ke perlombaan senjata / *arms race* (Hadiwinata, 2017). Menurut John H. Herz, *security dilemma* adalah:

a structural notion in which the self-help attempts of states to look after their security needs tend, regardless of intention, to lead to rising insecurity for others as each interprets its own measures as defensive and measures of others as potentially threatening (John H. Herz 1951 dalam Hadiwinata 2017 hal. 116).

Setiap negara merespon *security dilemma* sesuai dengan kekuatan ekonomi dan persepsi ancaman yang dirasakan. Bagi negara yang memiliki keterbatasan anggaran militer dan merasakan persepsi ancaman yang tidak terlalu mendesak, mereka akan membangun kekuatan militer seperlunya dengan membuat postur pertahanan yang essential, sedangkan negara yang secara ekonomi mampu memobilisasi sumber dana atau dengan kata lain memiliki kekuatan ekonomi yang memadai, mereka akan berfokus untuk membangun kekuatan militer yang baik dan cenderung membangun postur militer yang ofensif untuk menjadi kekuatan hegemoni di kawasan.

Security dilemma atau dilema keamanan dalam Hubungan Internasional kerap digambarkan sebagai situasi atau keadaan yang dimana sebuah negara mengambil tindakan untuk memperkuat sistem keamanan dan pertahanannya, seperti membentuk sebuah aliansi dengan negara lain atau meningkatkan kekuatan militer. Hal tersebut dapat membuat negara lain yang terutama negara tetangga sekitar, merespon tindakan tersebut dengan cara serupa. Hal tersebut dapat menciptakan bahkan meningkatkan ketegangan hingga terciptanya konflik (Jervis, 1978).

Sejarah panjang konflik antar manusia yang disebabkan oleh kondisi di atas juga dicatatkan oleh Thucydides dalam *The Peloponesian War*. Thucydides mendokumentasikan perang dua puluh tahun antara Athena melawan Sparta, di mana dalam buku tersebut Thucydides berpendapat bahwa perang tersebut dipicu oleh kekhawatiran berlebihan Sparta terhadap pembangunan kekuatan militer Athena (Hadiwinata, 2017). Dalam kasus tersebut, dapat dilihat bahwa negara duduk dalam situasi dilematis ketika niat membangun pertahanan diri justru dibaca sebagai tindakan agresif oleh negara lain, akibatnya negara tersebut juga membangun kekuatan militernya guna mengimbangi kekuatan militer lawannya.

Kepekaan *security dilemma* adalah niat dan kapasitas aktor untuk memahami motif di balik suatu masalah atau hal, dan untuk menunjukkan daya tanggap terhadap potensi kompleksitas niat militer orang/pihak lain. Secara khusus, ini mengacu pada kemampuan untuk memahami peran yang mungkin dimainkan oleh rasa takut dalam sikap dan perilaku mereka, termasuk peran yang mungkin dimainkan oleh tindakan seseorang dalam memprovokasi rasa takut itu. (Nicholas Wheeler & Booth, K., 2008)

Logika *si vis pacem para bellum* atau jika ingin perdamaian maka bersiap-siap untuk berperang adalah salah satu asumsi yang melandasi dilema keamanan dalam dunia internasional. Logika ini telah menjadi doktrin dan bekerja bagi suatu negara dalam upaya mewujudkan kondisi *negative peace* atau perdamaian negatif: suatu kondisi ketiadaan perang. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, tiap-tiap negara membangun armada bersenjata mereka meskipun sedang tidak dalam konflik dengan negara lain, apalagi jika mereka dalam situasi konflik dengan suatu negara.

Armenia dan Azerbaijan berkonflik dalam perbatasan negara atau wilayah sengketa di Nagorno-Karabakh, dan sering terjadi percikan yang mengakibatkan negara Armenia dan Azerbaijan mengambil langkah agar meningkatkan pertahanannya. Dalam konflik antara Armenia dan Azerbaijan, kedua negara itu meningkatkan pertahanan dan pembiayaan militer mereka, serta melakukan aliansi atau kerjasama dengan pihak lain karena sama-sama merasa terancam dengan peningkatan kekuatan negara bertetangga tersebut. Hal ini menggambarkan kondisi *security dilemma* yang dialami oleh kedua negara, dimana tiap upaya memperkuat militer negara dianggap sebagai suatu ancaman serius terhadap keamanan negara lain, dalam hal ini antara Armenia dan Azerbaijan.

C. Military Industrial Complex

Negara yang mengamini sistem demokrasi dalam kehidupan bernegaranya umumnya memisahkan kekuasaan pada tiga lembaga negara: eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Pemisahan itu dikenal sebagai *trias politica* yang menjadi tiang demokrasi suatu negara. Pemisahan kekuasaan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Lord Acton: “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”, sehingga pemisahan kekuasaan diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kekuasaan dan tercipta kondisi yang *check and balances* dalam kehidupan bernegara.

Konsep *military-industrial complex* merupakan suatu istilah yang populer pasca pidato perpisahan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower pada 1961. Dalam pidatonya tersebut ia menggunakan terminologi *military-industrial complex* sebagai gambaran relasi antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan pihak swasta di Amerika Serikat dalam menentukan *military budget* negara tersebut. Konsep ini paling sering didefinisikan dalam literatur AS menjadi subjek tentang koalisi kelompok dan badan

yang memiliki pengaruh besar dan berbagi kepentingan ekonomi, kelembagaan, atau politik yang bertujuan untuk mengintensifkan anggaran pertahanan AS (Arafah, 2021).

Ketika ukuran sektor militer di suatu negara dan pentingnya bagi perekonomian, atau bahkan biayanya bagi perekonomian, mendapat sorotan, keberadaan *Military-industrial Complex* (MIC) sering disinggung. Secara umum hal itu dimaksudkan untuk mewakili kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mendapat manfaat dari pengeluaran militer dan pertumbuhannya (Dunne & Skonsmengulas, 2009). MIC kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang membingkainya sebagai koalisi kepentingan pribadi di dalam negara dan industri, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang merupakan kepentingan anggota koalisi dalam industri tersebut dan belum tentu demi kepentingan keamanan nasional. Koalisi ini dapat mencakup beberapa anggota angkatan bersenjata, birokrasi pertahanan sipil, legislatif, produsen senjata dan pekerja mereka.

Secara garis besar, *military-industrial complex* merupakan kelompok yang memiliki peran dalam penganggaran militer dalam suatu negara. Dalam hal ini, kelompok tersebut biasanya terdiri dari tiga *stakeholder*, yaitu eksekutif dalam hal ini kementerian pertahanan, legislatif, serta pihak industri pertahanan baik yang swasta maupun yang dimiliki oleh negara. Relasi ketiganya dalam menentukan besaran belanja militer dan perntukannya sangat besar karena ketiganya memiliki kepentingan masing-masing. Ketiga aktor ini dikenal sebagai *defense iron triangle* (DIT) atau segitiga besi pertahanan, dimana industri, pemerintah, dan legislatif memainkan

peranan penting dalam setiap pengadaan persenjataan guna menunjang pengembangan industri pertahanan (Arafah, 2021).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi pustaka atau *library research* yang menganalisis pengaruh *Military Expenditures* Armenia dan Azerbaijan terhadap konstalasi konflik di Nagorno Karabakh pada 2020 lalu. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian pertama berjudul Konflik Azerbaijan Dengan Armenia atas Wilayah Nagorno-Karabakh Dalam Konteks Hukum Internasional oleh Anna Yulia Hartati. Jurnal ini membahas mengenai konflik Azerbaijan-Armenia dalam konteks Hukum Internasional. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan membahas pengaruh *military expenditures* terhadap jalannya konflik di Nagorno-Karabakh pada 2020 lalu.

Penelitian selanjutnya berjudul Is Peaceful Regulation of The Nagorno-Karabakh Conflict Mission Impossible? Oleh Natalia Beklarova dan Iilina Armencheva. Jurnal ini membahas tentang gambaran akan pilihan yang tersedia untuk penyelesaian konflik dan alasan mengapa kurangnya solusi yang dapat diterima oleh Armenia dan Azerbaijan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian ini akan berfokus pada factor *military expenditures* yang akan berperan dalam penyelesaian konflik Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh pada 2020 lalu.

Penelitian ketiga berjudul Countries Military Expenditures: Definitions and Determinants oleh Ganesh Kumar. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang apa saja factor yang menentukan dalam *military expenditures* suatu negara, selain itu juga

dibahas tentang pengertian *military expenditures*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan berfokus dalam menganalisis *military expenditures* Armenia dan Azerbaijan. Penelitian tersebut juga akan menjadi acuan dalam menentukan definisi dari apa itu *military expenditures* dan apa saja factor-faktor yang mendorong *military expenditures* suatu negara.